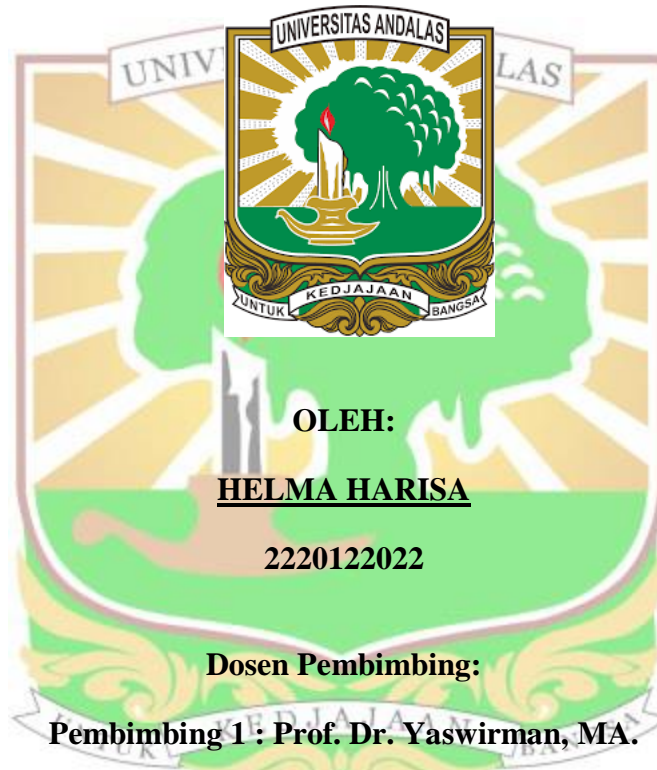


**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA YANG
DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Magister Kenotariatan*



OLEH:

HELMA HARISA

2220122022

Dosen Pembimbing:

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Yaswirman, MA.

Pembimbing 2 : Dr. Yasniwati, S.H., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1/PDT.G/2021/PA.PBR)

(Helma Harisa, 2220122022, 103 Halaman, Prodi Magister Kenotariatan, 2024)

Pembatalan perkawinan merupakan sebuah tindakan Pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang dan hukum atau peraturan yang berlaku. Salah satu kasus pembatalan perkawinan yaitu pada perkara nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru. Alasan pembatalan perkawinan tersebut adalah karena adanya penipuan dan pemalsuan identitas oleh seorang laki- laki yang mengaku sebagai duda. Setelah perkawinan tersebut dilaksanakan barulah diketahui bahwa ternyata ia masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain dan tidak pernah ada perceraian yang terjadi diantara mereka, serta istri pertamanya tersebut juga tidak pernah memberikan izin poligami. Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada Kasus Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, dan sumber dan jenis data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data primer yaitu Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan beberapa peraturan perundang- undangan yang terkait. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada perkara pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr, lebih tepat menggunakan ketentuan pada Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, karena dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut, perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan kedua dari pihak suami yang artinya ada perkawinan terdahulu. Oleh karena itu maka secara hukum formil harta bersamanya otomatis menjadi batal dan tidak ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan apabila pembatalan perkawinan yang mana tidak ada perkawinan sebelumnya.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama, Pengadilan Agama

ABSTRACT

EFFECTS OF MARRIAGE CANCELLATION LAW ON PROPERTY ACQUIRED DURING THE MARRIAGE BASED ON CONSTITUTION NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE (CASE STUDY CASE NUMBER 1/PDT.G/2021/PA.PBR)

(Helma Harisa, 2220122022, 103 Pages, Notary Master's Study Program 2024)

Marriage annulment is an action by the Court which cancels a marriage so that the marriage is deemed to have never existed due to failure to fulfill the conditions determined by the Act and applicable laws or regulations. One case of marriage annulment is case number 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr at the Pekanbaru Religious Court. The reason for the annulment of the marriage was due to fraud and falsification of identity by a man who claimed to be a widower. After the marriage was carried out, it was discovered that he was still legally married to another woman and there had never been a divorce between them, and his first wife had never given permission for polygamy. The problem in writing this thesis is what are the legal consequences of marriage annulment on assets obtained during the marriage and how the judge considers when deciding a marriage annulment case in Case Number 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Then, in conducting the research, the author used a normative type of legal research, and the source and type of data used was library research with the nature of analytical descriptive research. The primary data source is Case Decision Number 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr and several related laws and regulations. From the results of the research, it can be concluded that in cases of division of joint assets resulting from an annulment of marriage in the Religious Court Decision Number 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr, it is more appropriate to use the provisions in Article 28 paragraph (2) letter b of Law Number 1 1974 concerning Marriage above, because in the case of annulment of marriage, the marriage that is annulled is the husband's second marriage, which means there was a previous marriage. Therefore, legally, joint assets automatically become invalid and there is no division of joint assets. Division of joint assets can only be carried out if a marriage is annulled where there was no previous marriage.

Keywords: Annulment of Marriage, Joint Property, Religious Courts